



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/5/KEP/DPRD/2021

TENTANG

REKOMENDASI KEPADA BUPATI MAGELANG
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG
TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah dilaksanakan Rapat Komisi I sampai dengan IV membahas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 pada Tanggal 6 sampai dengan Tanggal 13 April 2021 sesuai dengan Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 170/151/02/2021 Tanggal 8 April 2021 Perihal : Jadwal Kegiatan DPRD Bulan Maret s.d. April 2021;
- b. bahwa hasil pembahasan tiap komisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaporkan dalam Rapat Gabungan Pimpinan pada Tanggal 14 April 2021 dan dihasilkan Rekomendasi kepada Bupati Magelang sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi dasar bagi Bupati sebagai bahan dalam :
- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 April 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,**



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/5/KEP/DPRD/2021
TENTANG
REKOMENDASI KEPADA BUPATI
MAGELANG ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
MAGELANG TAHUN 2020

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG
TAHUN 2020

1. SEKRETARIAT DAERAH

a. BAGIAN PEMERINTAHAN

Tidak ada rekomendasi

b. BAGIAN HUKUM

Bagian hukum harus lebih responsif terhadap kondisi dan permasalahan pemerintahan Kabupaten Magelang, saat ini dinamika dan perkembangan regulasi sangat cepat dan kadang ada isi yang bertentangan. Bagian hukum bertugas dan berkewajiban untuk melakukan harmonisasi penerapannya di Kabupaten Magelang menyesuaikan kondisi yang ada di Magelang. Selama ini rata-rata produk hukum daerah di Kabupaten Magelang hanya cenderung mutatis mutandis dari regulasi pusat.

c. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 1) Peningkatan kegiatan keagamaan perlu lebih ditingkatkan untuk membangun mental dan spiritual generasi muda baik dari segi sosial maupun peningkatan kualitas moral.
- 2) Terkait insentif untuk guru ngaji yang dianggarkan sebesar Rp. 6.331.000.000. di tahun 2020, dikarenakan masih adanya temuan, keluhan dan aduan tentang masih adanya data yang salah bagi penerima insentif. Untuk itu, DPRD mendorong Bagian Kesra untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap penerima insentif bagi guru ngaji tersebut.

d. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

- 1) Pendapatan dari BUMD menjadi salah satu komponen pendapatan yang diandalkan untuk mendongkrak PAD. Sesuai regulasi yang ada bahwa pendapatan dari BUMD disetorkan ke Kas Daerah setelah selesainya audit dari akuntan publik/independen. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak-pihak terkait khususnya deviden Bank Bapas 69 yang selalu disetor pada akhir tahun atau triwulan ketiga diharapkan tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.
- 2) Belum adanya Perbup sebagai petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Perda CSR) menjadi catatan. Perbup yang mengatur terkait pemungutan dan pemanfaatan dana CSR dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Magelang sangat dibutuhkan sebagai payung hukum pelaksanaannya. Bagian Perekonomian diharapkan bisa segera melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum untuk menyelesaikan Perbup dimaksud, sehingga kemanfaatan dana CSR bisa segera dirasakan masyarakat.

- 3) Kartu Tani yang sampai saat ini masih mengalami kendala dalam penerbitannya menjadi salah satu penyebab pendistribusian pupuk bersubsidi di masyarakat terganggu. Hal tersebut harus segera dicarikan solusi agar para petani bisa segera mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai haknya. Maka diharapkan agar Bagian Perekonomian segera melakukan langkah-langkah konkret dengan mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

e. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Anggaran Tahun 2020 pada Bagian Administrasi Pembangunan Daerah sebesar Rp. 466.420.700 terealisasi Rp 464.002859 atau sebesar 99,48%. Secara umum, Bagian Administrasi Pembangunan Daerah telah berhasil dalam melaksanakan program utama dan pendukung, capaian kinerja *output* dan *outcome*-nya rata-rata tercapai 100%. DPRD menekankan agar dalam menyelenggarakan rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) tingkat kabupaten dapat menyajikan data hasil pelaksanaan pembangunan dalam rangka menyusun data/ bagan/ gambar/ visualisasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.

f. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2020 sebesar Rp. 596.523.500 terealisasi sebesar Rp. 578.542.470 atau sebesar 96,99%. DPRD menekankan agar dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah harus selalu berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi serta mengedepankan nilai-nilai profesionalitas dan integritas agar terlaksana pengadaan barang dan jasa yang transparan.

g. BAGIAN UMUM

Tidak ada rekomendasi

h. BAGIAN ORGANISASI

DPRD mendorong Bagian Organisasi untuk melakukan pemetaan kebutuhan organisasi disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

i. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa hendaknya kemasannya lebih representatif dan dapat dibaca oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Magelang. Pembuatan kalender dan buku profil belumlah dapat merata diterima oleh masyarakat. Sebagian media tersebut hanya diterima oleh kalangan tertentu dan belum mencakup seluruh warga masyarakat Kabupaten Magelang. Maka perlu adanya terobosan baru di dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan beberapa hal yang perlu dipahami oleh masyarakat luas terkait keberhasilan pembangunan dll.

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tidak ada rekomendasi.

3. INSPEKTORAT

Terkait fungsi pengawasan, DPRD menilai dalam melakukan tugas dan fungsinya Inspektorat masih kurang detail dalam melakukan pemeriksaan terhadap Obyek pemeriksaan, beberapa kegiatan di Desa disinyalir ada tumpang tindih kegiatan namun tidak terdeteksi, sehingga dikhawatirkan akan menjadi temuan besar jika kegiatan di desa tersebut diperiksa oleh instansi

selain Inspektorat, pemeriksaan dimaksud meliputi volume kegiatan dan rasionalitas anggaran.

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dalam kegiatannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan fungsi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pendidikan serta urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2020 pencapaian kinerjanya cukup baik di mana pada tahun 2020 pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai angka 85,47 dari target 89,02 dan Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai 79,60 dengan Angka putus sekolah SD/MI pada angka 0,04 dan untuk SMP/MTs/Sederajat pada angka 0,23.

Sedangkan untuk kinerja keuangan tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp. 752.195.602.538; realisasinya sebesar Rp. 710.085.556.135; atau 94,40%.

Berdasarkan capaian anggaran dan capaian terhadap indikator pelaksanaan program dan kegiatan, DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan sebagai berikut:

- a) Salah satu parameter untuk melihat kinerja urusan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Capaian untuk parameter ini adalah 7.78 dari target 7.86, oleh karena itu Program wajib belajar 12 tahun perlu didorong dan didukung agar rata-rata lama belajar siswa meningkat. DPRD merekomendasikan untuk mendorong upaya peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni serta menurunkan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Magelang.
- b) Optimalisasi penggunaan anggaran pendidikan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan serta upaya untuk pemerataan kualitas sekolah antar daerah dan antar wilayah khususnya yang berbatasan dengan wilayah Kota Magelang untuk terus diusahakan agar kualitas lulusan sekolah dari Kabupaten Magelang meningkat dan program ajakan untuk sekolah di wilayah Kabupaten Magelang tercapai.
- c) Berkaca dari pengalaman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun sebelumnya yang menimbulkan permasalahan khususnya di sekolah di wilayah perbatasan. DPRD merekomendasikan selain merujuk Permendikbud 44/2019 yang ditindaklanjuti Perbub. Juklak PPDB untuk dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan aksesibilitas pendidikan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayah dimana sekolah itu berada.
- d) Kesejahteraan guru dan tenaga nonguru (GTT/PTT) perlu ditingkatkan untuk mendukung capaian kinerja urusan pendidikan.
- e) Dikarenakan adanya pandemi Covid-19, selama kurun waktu 1 tahun pembelajaran yang diselenggarakan tidak bisa berjalan secara efektif. Maka dari itu, penting dalam mewujudkan generasi yang berkualitas sebagai upaya mencegah penurunan kualitas sumber daya manusia. DPRD mendorong untuk meningkatkan kepedulian, peran dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- f) Diharapkan Pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran pendampingan untuk DAK Pendidikan dan Disdikbud dalam pelaksanaan DAK di mulai dari perencanaan, verifikasi, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya untuk dilaksanakan sebaik mungkin mengingat realita di lapangan masih banyak sekolah yang masih membutuhkannya.

5. DINAS KESEHATAN

Urusan kesehatan di Kabupaten Magelang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Muntilan dan RSD Merah Putih. Untuk penyelenggaraan urusan kesehatan ini, DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan harus betul-betul memperhatikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan memperhatikan ketersediaan infrastruktur pelayanan kesehatan yang memadai mulai dari Pustu sampai tingkat Rumah Sakit termasuk penempatan petugas kesehatan terutama dokter di setiap daerah atau wilayah-wilayah terpencil sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- b) Dalam menghadapi pandemi global yaitu penyebaran covid 19 di Kabupaten Magelang saat ini, Pihak RSUD harus bisa memastikan semua fasilitas- fasilitas vital penunjang pelayanan medis bagi masyarakat atau pasien tersedia dalam kondisi dan keadaan yang baik, Melonjaknya kasus pasien terpapar virus corona kian hari kian mengkhawatirkan bagi kita semua, untuk itu diminta kepada pemerintah daerah agar bergerak cepat dan mengambil langkah-langkah taktis dalam usaha memutus mata rantai penyebaran virus ini.
- c) Dinas Kesehatan harus bisa berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat disetiap wilayah Kabupaten Magelang karena dengan kesehatan yang baik akan berbanding lurus dengan keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang.
- d) Capaian realisasi kinerja keuangan Dinas Kesehatan tahun 2020 Rp. 130.240.667.839; dari anggaran sebesar Rp. 175.424.128.156; atau tercapai 74,24%. Adapun capaian realisasi terendah adalah kegiatan Pengadaan Tanah untuk RSD Merah Putih yang terealisasi hanya Rp. 2.140.500; atau 0,01% dari anggran Rp. 15.600.000.000;, dengan alasan dalam proses tidak ditemukan kesepakatan harga, hal tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan dan eksekusi kegiatan. DPRD berpadangan hal tersebut akan berpegaruh pada ketersediaan infrastruktur pelayanan kesehatan yang memadai di tingkat Rumah Sakit.
- e) Capaian realisasi kinerja keuangan RSUD Muntilan tahun 2020 Rp. 103.939.473.996 dari anggaran sebesar Rp. 114.003.454.400 atau tercapai 91,2%. Adapun capaian realisasi terendah adalah kegiatan Akreditasi Rumah Sakit sebesar 28,35%, dikarenakan pada tahun 2020 survei verivikasi akreditasi RSUD Muntilan dibatalkan karena adanya Surat Edaran Kemenkes tentang penundaan kegiatan akreditasi rumah sakit akibat adanya pandemi Covid-19. Terkait hal tersebut DPRD mendorong RSUD Muntilan untuk selalu mengedepankan Akuntabilitas, transparansi dan pelayanan prima untuk mempertahankan dan meningkatkan kelulusan Akreditasi Paripurna.
- f) Capaian Peningkatan pendapatan BLUD rumah sakit Muntilan sebesar Rp. 77.224.446.741 dari target Rp. 61.000.000.000 atau 126,6% perlu mendapatkan apresiasi positif dan Terkait Pembinaan yang dilakukan rumah sakit Muntilan, DPRD meminta kepada saudara Direktur RSUD Muntilan untuk membuat aturan yang sesuai dan perencanaan yang bagus, serta pembinaan yang dilakukan memiliki prospek yang panjang sehingga efisiensi anggaran bisa dilakukan dan pemeliharaan ke dalam bisa semakin maksimal.

6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pada tahun 2020 DPU dan PR mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 72.435.996.675 yang dijabarkan pada 7 program dan 41 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 58.918.293.662 , atau sebesar 81,34 %. Capaian keberhasilan urusan pekerjaan umum terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu Panjang jalan dalam kondisi baik, panjang dan luas jaringan irigasi, serta jembatan dalam kondisi baik. Namun demikian ada beberapa hal menjadi catatan dari DPRD yaitu:

- a) DPRD menekankan agar DPU dan PR dalam setiap melaksanakan program kegiatan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan jangka usia atas manfaat hasil pekerjaan, dan membenahi sistem perencanaan yang lebih baik agar hasil yang dicapai sesuai harapan, meningkatkan

pengawasan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ke tiga atau penyedia barang/jasa serta memperhatikan hasil uji laboratorium sebagai pedoman tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan.

- b) DPU dan PR diharapkan dapat menyajikan data yang konkret, yang mudah diakses oleh masyarakat luas terkait data infrastruktur jalan, irigasi dan jembatan serta data lain yang menjadi kewenangan tugas DPU dan PR, sehingga apabila ada informasi yang disampaikan masyarakat atas kerusakan infrastruktur yang ada di Kabupaten Magelang lebih cepat tertangani.
- c) Target pendapatan dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 97,57 %. yang realisasinya belum mencapai 100 %, DPRD mendorong DPU dan PR untuk terus melakukan sosialisasi dan inovasi atau terobosan yang dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengurus IMB.

7. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Belanja langsung TA. 2020 di DPR dan KP sebesar Rp. 5.333.948.415 dijabarkan pada 4 program dan 17 kegiatan dengan serapan anggaran Rp. 5.190.847.302 atau 97,32%. Tolok ukur keberhasilan capaian kinerja urusan perumahan meliputi rumah tangga bersanitasi, lingkungan pemukiman kumuh dan rumah layak huni.

Atas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 pada DPRKP, DPRD memberikan catatan sebagai berikut:

Terkait dengan pelaksanaan RTLH, DPRD mengharapkan data yang digunakan harus data yang valid dan update serta terkoneksi dengan data yang dimiliki desa. Peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam melakukan verifikasi penerima RTLH harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga penerima RTLH tidak salah sasaran. Adanya keterbatasan anggaran dalam program bantuan RTLH yang dimiliki Pemerintah Daerah, DPRD mendorong DPRKP untuk mencari sumber dana lain melalui dana CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Magelang dan diharapkan ada koordinasi terpadu antar lembaga dalam optimalisasi penggunaan dana CSR dalam menangani pengetasan kemiskinan di Kabupaten Magelang.

8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Terkait dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan daerah meskipun capaian kinerjanya hampir 100 % namun pada kenyataannya Satpol PP dan PK belum mampu menyajikan data secara komprehensif terkait target dan capaian kinerja terhadap 12 Perda yang menjadi skala prioritas pengawasan. DPRD melihat bahwa apa yang tercatat dalam LKPJ belum sinkron dengan kondisi riil dilapangan, karena pada kenyataannya pada tahun 2020 masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran perda yang mestinya terdeteksi sejak awal, beberapa contoh pelanggaran perda seperti pembangunan Gedung Gudang Garam di Desa Banyurojo Mertoyudan yang sudah mencapai 85 % namun belum memiliki IMB, beberapa tower yang sudah berdiri namun belum berijin sebanyak 11 buah, Toko Modern yang sudah beroperasi padahal belum berizin.

Oleh karena itu DPRD meminta agar Satpol PP dan PK konsisten dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan mengoptimalkan anggaran dan petugas yang ada, sehingga Perda yang ada di Kabupaten Magelang dapat dikawal dengan baik, mulai dari sosialisasi maupun pada implementasinya. Di samping itu peran PPNS agar dimaksimalkan dalam upaya penegakan perda dan tidak kalah penting adalah menjalin koordinasi yang baik dengan instansi lain.

9. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Sosial, PPKB & PPPA melaksanakan fungsi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana. Untuk tahun 2020 Dinas Sosial PPKB & PPPA melaksanakan beberapa program yang salah satu sarasannya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin.

- a) Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial sebesar Rp. 11.237.427.765; sedangkan realisasinya sebesar Rp. 9.331.086.030; atau 83,04%. Sedangkan untuk Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp. 7.713.042.325; dengan realisasi sebesar Rp. 6.129.882.785; atau 79%. Hal ini berarti penyerapan anggaran urusan wajib pelayanan dasar sosial serta Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sudah efektif dimanfaatkan namun belum diserap dengan maksimal, Untuk itu DPRD mendorong ke depannya lebih mengoptimalkan penyerapan anggaran agar dalam penyusunan program dan kegiatan lebih realistis sehingga tujuan mengurangi jumlah penduduk miskin tercapai. Serta upaya peningkatan kinerja dan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, harus lebih ditingkatkan, dilakukan secara berkesinambungan, sesuai tahapan yang berlaku dan melakukan upaya baru sebagai solusi tambahan untuk menekan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- b) Masih adanya bantuan – bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan adanya temuan dan keluhan tentang masih adanya data yang salah. Bahwa masih ada warga yang tidak masuk kategori miskin namun masih tercatat sebagai penerima manfaat. Untuk itu DPRD mendorong untuk data masyarakat penerima bantuan sosial diverifikasi ulang dengan memedomani aturan terkait Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- c) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Magelang yang belum tertangani untuk segera melakukan langkah-langkah konkret diantaranya yang harus dilakukan dengan terus menerus melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi PMKS yang tentunya diselaraskan dengan rencana penganggaran yang lebih baik sehingga diwujudkan penangan PMKS yang lebih baik dan diharapkan kedepan bisa berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Magelang. Serta terus melakukan upaya koordinasi lintas sektoral agar harmonisasi antar perangkat OPD untuk pencapaian program Kependudukan dan KB di Kabupaten Magelang dapat terkondisi dengan baik.

10. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar berkaitan dengan ketenagakerjaan, untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) DPRD merekomendasikan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja agar meningkatkan kegiatan-kegiatan pelatihan berbasis pengentasan kemiskinan dengan mencari alternatif lain yang tuntas sampai dengan terwujudnya kemandirian berwirausaha.
- b) Problematika hari ini dengan adanya pandemi Covid-19 adalah adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Akibat dari kesenjangan itu, maka jumlah pengangguran bertambah secara signifikan. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan DisperinNaker untuk menghasilkan kebijakan bersifat lintas sektoral dan terintegrasi antara seluruh OPD yang ada di lingkungan Kabupaten Magelang untuk terus-menerus mengupayakan penciptaan lapangan kerja baru yang produktif padat karya dan banyak menyerap para pencari kerja baru.
- c) Zaman yang semakin berkembang dan maju tentunya membutuhkan Inovasi penyesuaian program kerja dan program kegiatan, berkaitan dengan hal tersebut DPRD memberikan saran agar program pelatihan di Balai Latihan Kerja pada DisperinNaker harus merujuk pada kebutuhan pasar tenaga kerja khususnya di wilayah Kabupaten Magelang, dengan

ditetapkannya Candi Borobudur sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, DPRD mendorong agar DisperinNaker membuat Pelatihan Kepariwisata dan Perhotelan mengantisipasi berkembangnya potensi pariwisata yang ada disekitar Candi Borobudur khususnya dan wilayah Kabupaten Magelang pada umumnya.

- d) Berkaitan dengan pencapaian target program kegiatan dan serapan anggaran, DPRD berharap agar pencapaian tersebut tidak hanya pencapaian angka kuantitatif tanpa nilai manfaat buat masyarakat akan tetapi haruslah pencapaian kualitatif yang dirasakan oleh masyarakat tentunya dengan peningkatan ketrampilan kualitas SDM dan kemudahan masyarakat dalam mencari kerja khususnya di wilayah Kabupaten Magelang.

11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran 2020 di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 15.009.819.855 terserap Rp.12.881.586.707 atau 85,31%. Rekomendasi dari DPRD adalah:

- a) Penanganan sampah di TPA yang dimiliki Pemerintah Daerah saat ini masih menimbulkan permasalahan baik pada sisi pengelolaan sampah itu sendiri maupun masyarakat di sekitar TPA. Mengingat penanganan sampah secara swadaya mandiri sangat diperlukan, untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah, DPRD menekankan kepada DLH untuk lebih intens memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga dan lainnya sebelum dibuang. Meningkatkan pembinaan dan memfasilitasi kelompok bank sampah untuk lebih dimaksimalkan keberadaannya dalam menangani pengelolaan sampah secara swadaya mandiri.
- b) Mendorong DLH untuk mewujudkan TPA regional yang memenuhi kaidah teknis, sosial ekonomi dan lingkungan serta lokasi yang tepat agar permasalahan sampah di Kabupaten Magelang segera tertangani.
- c) Diperlukan inovasi pengembangan program konservasi lahan dan sumberdaya air secara menyeluruh dan inovatif dalam merancang pemanfaatannya berbasis kelompok pemukiman masyarakat dengan mengadopsi kearifan lokal sebagai sumber kemandirian masyarakat dalam mengelola sumberdaya air secara berkelanjutan.

12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a) Masih adanya keluhan dari masyarakat terkait proses pembuatan e ktp yang belum lancar meskipun sudah melalui wa on line.
- b) Pemanfaatan data kependudukan yg masih sering terjadi ketidaktepatan, seperti data calon pemilih pada gelaran pemilu
- c) Data kependudukan yg menjadi dasar, semestinya bisa menjadi patokan agar tidak terjadi duplikasi/kesalahan data
- d) penumbuhan kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan harus terus dilakukan, dengan berbagai upaya sosialisasi masif ke masyarakat

13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a) Peran dan fungsi pendamping desa dirasa masih belum optimal. Untuk itu DPRD mendorong Dispermades agar menciptakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para pendamping desa.
- b) Pada tataran pelaksanaan kegiatan, DPRD melihat Dispermades kuat dalam pembinaan tata pemerintahan desa, tetapi lemah pada fungsi pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan.
- c) Kemampuan membaca, menerjemahkan dan mengharmonisasi regulasi-regulasi ke desa masih keteteran ditambah keberanian mengambil sikap sebagai pedoman Juklak dan Juknis bagi desa masih lemah sehingga energi dan sumber daya yang ada di desa habis untuk menyikapi instruksi ke desa yang berubah-ubah.

- d) Meskipun desa diberi pembinaan dengan berbagai macam pembinaan, setiap kegiatan pembangunan di desa selalu menunggu petunjuk dari Pemkab. Ini menyebabkan keterlambatan program. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan-pelatihan sistem perencanaan pembangunan desa dibutuhkan narasumber yang lebih berkualitas dan variatif.

14. DINAS PERHUBUNGAN

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan mendapat alokasi sebesar Rp. 25.549.427.352,00 terealisasi Rp. 24.685.766.822,00 atau sebesar 96.62 %. DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) DPRD mendorong Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum untuk dapat melakukan kajian secara komprehensif, baik sistem pengelolaannya maupun kerjasama dengan pihak ketiga serta agar pengelolaan parkir dapat dilakukan melalui satu pintu oleh Dinas Perhubungan supaya lebih efektif dan terkendali.
- b) Berkaitan dengan optimalisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor di masa pandemi covid 19, DPRD mendorong Dinas Perhubungan agar terus berinovasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat nyaman dan aman dari covid 19 agar pelayanan KIR bisa lebih cepat bagi pemohon dan waktu penyelesaiannya.

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada TA 2020, Diskominfo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.643.632.345 dengan realisasi sebesar Rp. 8.045.690.217 atau 93,18 % dan realisasi fisik tercapai 100%. Target pendapatan retribusi dari kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang sebesar Rp.100.000.000 dengan realisasi Rp.80.633.000 tercapai 80,63%. Sedangkan target pendapatan dari kegiatan Penarikan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Rp. 1.000.000.000, realisasi penarikan retribusi menara sebesar Rp.1.123.000.000. DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Terkait dengan tower/menara telekomunikasi yang tidak berizin bagaimana langkah dan upaya Diskominfo serta pengawasannya. DPRD mendorong Diskominfo untuk melakukan upaya dan langkah-langkah penindakan terhadap tower/menara yang tidak berizin.
- b) Terkait dengan KIM (kelompok informasi masyarakat) sebagai fungsi literasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, DPRD mendorong agar KIM dapat dibentuk dimasing-masing desa sehingga dapat memberikan kemampuan kepada masyarakat dalam mengakses dan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer dan internet untuk kepentingan mengakses informasi atau untuk mendayagunakan sebagai jasa dan produk teknologi informasi dan komunikasi.

16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- a) Masih kurangnya sumber daya manusia di DPMPTSP menjadikan pelayanan perizinan tidak bisa maksimal, seperti tahun-tahun sebelumnya SOP yang telah ada tidak dapat dijalankan sesuai harapan. Kinerja DPMPTSP sampai saat ini masih tergantung pada kinerja OPD terkait lainnya, sehingga sampai saat ini masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang Perizinan dan Penanaman Modal tidak bisa terlayani dengan cepat dan tepat, maka penambahan personil di DPMPTSP mutlak dibutuhkan.
- b) Tidak bisa dilaksanakan kegiatan sosialisasi di masyarakat menyebabkan pemohon pelayanan perizinan pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 40%-50%, sehingga harapan ke depan kegiatan sosialisasi ataupun pembinaan di masyarakat harus terus ditingkatkan.

17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- a) DPRD memberikan apresiasi yang tinggi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atas diperolehnya penghargaan sebagai Perpustakaan Kabupaten / Kota Terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2020 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Semoga hal ini membuat para peminat baca semakin meningkat dengan didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan gedung perpustakaan yang nyaman.
- b) Perpustakaan bukan hanya sebagai tempat menyimpan dan membaca koleksi buku dan majalah namun perpustakaan berfungsi pula sebagai tempat mengakses informasi dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, DPRD mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan agar berinovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat di masa pandemi covid-19, seperti membuka layanan kepada masyarakat untuk memfungsikan gedung untuk berkegiatan masyarakat yang terkait dengan peningkatan literasi, melakukan beberapa pelatihan guna peningkatan pengetahuan yang bisa berdampak peningkatan kesejahteraan.
- c) Perlu ditingkatkan minat baca dan mengembangkan perpustakaan sekolah serta layanan perpustakaan keliling yang menjangkau pelosok desa-desa di samping terus menambah bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk melakukan kajian Indeks Literasi di Kabupaten Magelang.

18. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

- a) Dalam rangka mencukupi pemenuhan kebutuhan benih ikan di Kabupaten Magelang, Dispeterikan diharapkan bisa melakukan upaya-upaya antara lain melalui program Peningkatan dan Revitalisasi Balai Benih Ikan (BBI) Lokal serta pemberdayaan masyarakat melalui Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Namun berdasarkan kondisi riil di lapangan bahwa kondisi Balai Benih Ikan (BBI) Lokal yang ada saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga diharapkan perlu adanya evaluasi dan kajian dari Dispeterikan terhadap kondisi dan kinerja BBILokal Kabupaten Magelang. BBI Lokal yang memiliki fungsi diantaranya sebagai desiminasi teknologi serta produksi benih ikan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan benih ikan di Kabupaten Magelang.
- b) Dispeterikan diharapkan terus melakukan upaya dalam pengembangan budidaya ikan lokal, hal tersebut sejalan dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait program Pengembangan Komoditas Ikan Lokal. Dispeterikan diharapkan benar-benar intens dalam melakukan pengembangan benih ikan lokal, seperti : ikan beyong, ikan melem, ikan gabus serta jenis ikan lokal lainnya yang saat ini sangat diminati dan dibutuhkan masyarakat, disamping kegiatan tersebut sebagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Kabupaten Magelang.
- c) Hasil produk peternakan di Kabupaten Magelang yang sampai saat ini belum bisa menjadi ikon atau unggulan daerah menunjukkan belum optimalnya pengembangan potensi peternakan di Kabupaten Magelang. Melalui Dispeterikan mestinya pengembangan potensi peternakan harus lebih dioptimalkan, sehingga melalui sektor peternakan ini ke depan bisa lebih mengangkat perekonomian masyarakat.

19. DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA

- a) Dengan ditetapkannya Borobudur menjadi salah satu kawasan super prioritas pembangunan pariwisata nasional, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menangkap peluang-peluang yang ada. Candi Borobudur yang telah ditetapkan oleh Unesco sebagai salah satu warisan dunia (*World Heritage*) diharapkan tidak hanya mampu mendatangkan pengunjung di Borobudur saja melainkan juga di kawasan sekitarnya. Penguatan Desa Wisata di Kabupaten Magelang diharapkan bisa menjadi solusi untuk menangkap peluang tersebut, dan untuk mewujudkan hal itu

perlu sarana prasarana pendukung serta pengembangan potensi daya tarik wisata yang mengangkat budaya lokal.

- b) Tuntutan Inovasi untuk meningkatkan daya tarik pariwisata di Kabupaten Magelang harus terus dilakukan. Disparpora bersama *stakeholder* terkait dituntut untuk terus adaptatif, kreatif dan inovatif dalam menyikapi perkembangan dunia pariwisata, sehingga sektor pariwisata yang merupakan sektor unggulan Kabupaten Magelang diharapkan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- c) Kegiatan Penataan Kawasan Pariwisata Daya Tarik Wisata (DAK) yang telah dianggarkan sebesar Rp 4.202,076.059.000,- tidak dapat direalisasikan (0%) dikarenakan adanya Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi di Jawa Tengah hendaknya bisa menjadi catatan evaluasi dalam perencanaan, serta harapannya anggaran tersebut bisa segera dialihkan untuk kegiatan lainnya.

20. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

- a) Komitmen Pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan harus diimbangi dengan perhatian terhadap nasib para petani. Namun sesuai kondisi dan realita di lapangan, dimana banyak petani yang mengalami kesusahan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yang disebabkan karena permasalahan Kartu Tani yang sampai saat ini semua belum bisa dicetak. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Pertanian & Pangan harus melakukan langkah-langkah koordinasi dengan semua pihak guna mendapatkan solusi, termasuk dengan pihak BRI sebagai instansi yang diberikan kewenangan untuk mencetak Kartu Tani.
- b) Kebutuhan petani akan Alsintan dan sarana prasana pertanian lainnya hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan produktivitasnya para petani masih membutuhkan dukungan atau bantuan dari pemerintah, sehingga disayangkan apabila pada Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Perkebunan yang hanya dapat direalisasikan 69,72% dikarenakan pada pengadaan culvitor yang semula dengan gerobaknya tidak dapat terbeli karena ada kenaikan harga, sehingga hal tersebut harus dievaluasi sehingga kedepan tidak terulang kembali. Pelaksanaan Hibah/Bansos di Bidang Pertanian ke depan harus lebih baik lagi, Belanja Hibah Barang yang berupa Alat-Alat pertanian (*power thresher, paddy mower, pompa air dll*) ke depan pelaksanaannya harus lebih baik. Harapannya bantuan-bantuan tersebut para petani di Kabupaten Magelang akan lebih berdaya dan sejahtera.

21. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

- a) Dalam rangka upaya pemulihan ekonomi masyarakat khususnya di sektor UMKM, Pemerintah Daerah harus segera mencairkan dana JPE khususnya bantuan stimulus bagi para pelaku UMKM. Berbagai permasalahan yang menyangkut JPE pada Tahun 2020 hendaknya segera dicarikan solusi. Berdasarkan data dan informasi dari Disdagkop UKM, bahwa saat ini proses verifikasi dan validasi bagi calon penerima bantuan stimulus ekonomi bidang UMKM telah selesai dilaksanakan, dari 28.188 pemohon yang masuk sistem aplikasi Disdagkop UKM ada 24.598 pemohon telah masuk dalam klusterisasi. Hal tersebut harus segera ditindaklanjuti, mengingat sampai saat ini belum jelas dana stimulus JPE tersebut akan direalisasikan.
- b) Pentingnya update database UMKM di Kabupaten Magelang sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk menentukan kebijakan di Bidang UMKM, mengingat database UMKM yang ada saat ini merupakan hasil pendataan tahun 2011. Pelaksanaan update data UMKM di 21 Kecamatan dirasa sangat penting karena keberhasilan program kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah seperti: sosialisasi, pembinaan, pameran dan pemasaran serta pemberian bantuan tentunya tidak lepas dari data

yang akurat. Selain itu, dengan adanya *database* yang valid, Pemerintah Daerah akan bias menginventarisir potensi di setiap wilayah.

- c) Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya perlindungan terhadap produk lokal khususnya produk UMKM. Melalui Disdagkop UKM diharapkan bisa menjalin kerjasama dengan toko modern berjejaring seperti Indomart, Alfamart dan sejenisnya untuk bisa menampung dan menjual produk lokal khususnya hasil produk UMKM di Kabupaten Magelang, sehingga harapan kedepan produk lokal tidak kalah bersaing dengan produk-produk dari luar.
- d) Untuk memberikan penguatan terhadap keberadaan pasar tradisional yang semakin tergeser dengan menjamurnya pasar/toko modern di Kabupaten Magelang hendaknya perlu dilakukan evaluasi sekaligus penertiban terhadap izin pendirian pasar/toko modern. Selain itu program revitalisasi pasar tradisional harus terus dilakukan. Harapan kedepan keberadaan pasar-pasar tradisional yang bersih, aman dan nyaman bisa tetap terwujud, sehingga pasar tradisional tetap menjadi pilihan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.

22. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH

- a) Terkait dengan kegiatan seleksi ASN dimana salah satunya adalah penyelesaian tenaga Honorer K2 menjadi P3K, DPRD mendorong agar BKPPD lebih intensif meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti KemenPan RB maupun BKN sehingga formasi usulan P3K dari pemerintah Kabupaten Magelang bisa terakomodir lebih banyak .
- b) Kegiatan penyelenggaraan Bimbingan Teknis untuk PNS perlu untuk lebih ditingkatkan namun tetap harus mengedepankan aspek kualitas dan skala kebutuhan yang mendesak. Perlunya bintek untuk PNS adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga diharapkan setelah mengikuti bintek tersebut hasil pelaksanaan tugas para PNS lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

23. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

- a) Berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, DPRD melihat bahwa masih ada beberapa target kinerja 2020 belum terselesaikan dengan baik seperti penyelesaian aset Plaza Muntilan dan Obyek wisata Kalibening. Untuk obyek wisata Kalibening yang dilaksanakan oleh PT. TIWU sampai dengan akhir tahun 2020 belum terselesaikan karena terkendala dokumen penyerahan aset dari PT. TIWU kepada pemerintah Kabupaten Magelang. Meskipun sudah beberapa kali dilayangkan surat namun sampai dengan akhir tahun belum ada surat balasan dari PT. TIWU sedangkan untuk Plaza Muntilan masih dilakukan upaya persuasif dengan pendekatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas biaya sewa yang sudah ada *appraisal*-nya. Oleh karena itu, DPRD mendorong agar pada tahun 2021 permasalahan aset tersebut bisa segera terselesaikan.
- b) Berkaitan dengan penerimaan pendapatan daerah, DPRD melihat masih maraknya pengemudi truk angkutan pasir yang tidak mau melakukan transaksi pembayaran pajak di Pos Pemungutan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu DPRD mendorong agar BPPKAD mencari akar permasalahan serta solusi yang terbaik sehingga penerimaan pajak bisa ditingkatkan kembali.

24. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dari anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Magelang TA. 2020 sebesar Rp. 2.948.144.785 realisasinya sebesar Rp. 2.708.011.997 atau sebesar 91,85% dan capaian fisik kegiatan rata-rata sebesar 100%.

Penyajian di dalam LKPJ terkait perencanaan di Kabupaten Magelang, DPRD melihatnya belum menunjukkan progress yang signifikan dan arah yang jelas. Serta belum menyajikan data *output*, *outcome* dan *impact* dari setiap

perencanaan program. Hal inilah yang membuat LKPJ belum menunjukkan langkah-langkah untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati.

Dalam hal Partisipasi dan peran masyarakat terkait perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang, DPRD berpandangan belum terlihat kesungguhan Pemerintah Daerah untuk mengakomodir dan mewujudkan hasil Musrenbang, dengan alasan keterbatasan anggaran sehingga terkesan bahwa Musrenbang hanya sebatas menjalankan peraturan yang berlaku, tetapi tidak menyiapkan sarana untuk mewujudkan usulan masyarakat melalui Musrenbang.

25. KECAMATAN

Tidak ada rekomendasi.

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- a) BPBD sebagai satuan yang mempunyai tanggung jawab besar dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Magelang diharapkan lebih mampu melakukan kerja secara efektif dan efisien. Oleh karena itu DPRD merekomendasikan BPBD untuk melakukan *mapping* daerah rawan bencana secara tepat. Langkah tersebut penting dalam melakukan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi daerah yang terdampak bencana. Teknisnya, Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan manajemen infrastruktur serta sarana dan prasarana pemulihan, sesuai dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Terkait sistem penganggaran penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana agar disesuaikan dengan PP Nomor 22 tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan melihat pentingnya peran BPBD dalam ketangap darurat DPRD mendorong agar anggaran yang diperuntukan untuk BPBD diberikan secara Proporsional dan Rasional mengingat wilayah Kabupaten Magelang di wilayah rawan bencana.

27. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada program wawasan kebangsaan yang salah satu bentuk kegiatannya adalah peningkatan kesadaran bela Negara pada APBD Penetapan Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 270.000.000,00 sedangkan pada APBD Perubahan mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp1.270.000.000,00. Dengan besaran anggaran tersebut Kesbangpol merencanakan kegiatan berupa apel siaga dan sarasehan dengan menghadirkan kurang lebih 12.000 (dua belas ribu) peserta, akan tetapi dalam pelaksanaannya Kesbangpol hanya mampu menghadirkan 4.400 (empat ribu empat ratus) peserta dengan jumlah anggaran yang terserap sebesar Rp455.753.680,- dan jika diprosentase hanya sebesar 25,89 %. Sedangkan pada saat pembahasan Perubahan APBD 2019 Kesbangpol telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan anggaran tersebut. Dalam hal ini DPRD dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kesbangpol dalam berkoordinasi dan komunikasi dengan masyarakat khususnya para *stakeholder* masih kurang optimal, sehingga target tidak dapat tercapai.
- b. Dari sisi perencanaan DPRD menilai bahwa Kesbangpol kurang cermat dalam melakukan perencanaan anggaran dan waktu pelaksanaan, sehingga target tidak tercapai.

- c. Permasalahan kekurangan personil dan profesionalisme SDM di Kesbangpol masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan di kesbangpol.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



SARYAN ADIYANTO